

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Pertanian memiliki peranan yang penting baik di sektor perekonomian ataupun pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan, dengan meningkatnya jumlah penduduk maka bertambah pula jumlah kebutuhan untuk konsumsi pangan sehingga hal ini dapat meningkatkan perekonomian bagi petani. Petani memiliki peran penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Sektor pertanian merupakan sektor yang mampu menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk Indonesia tergantung padanya.

Peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional secara empiris terbukti cukup nyata baik dalam kondisi perekonomian yang normal maupun pada saat perekonomian menghadapi krisis. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) indikator penting, yaitu: kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia dan penyerapan tenaga kerja.¹

Dilihat dari kontribusinya terhadap PDB Indonesia, sektor pertanian merupakan penyumbang ketiga terbesar setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2005, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia berdasarkan harga konstan tahun 2000 tercatat sebesar 14,54%. Sementara itu dilihat dari penyerapan tenaga kerja sektoral, sektor pertanian nampaknya masih mendominasi dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 44%.²

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi lumbung pangan nasional dengan potensi sumber daya lahan seluas 1,147 juta hektar, Jawa Timur masih merupakan andalan utama produksi pangan di dalam negeri khususnya beras. Jutaan keluarga di

¹ Tri Haryanto, *Ekonomi Pertanian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 10

² Ibid

Jawa Timur mengandalkan hidup dari menanam padi, sehingga diperlukan upaya dan strategi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Timur.³

Satu hal yang tidak kalah penting dari sektor pertanian yang berperan penting dalam penggerak perekonomian nasional yaitu memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baik di skala nasional maupun regional. Pada skala regional khususnya di Provinsi Jawa Timur, salah satu daerah yang terkenal dengan sektor pertaniannya adalah kota Lamongan.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan menunjukkan, pada tahun 2014 sektor pertanian Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan kontribusi sebesar 40,13 % (persen) dari total PDRB yang dihasilkan dari luas lahan pertanian sawah seluas 87.762 hektar (ha) dan lahan pertanian non sawah seluas 55.751 hektar (ha).⁴

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 181.280 Ha, dimana penggunaan lahan didominasi oleh lahan sektor pertanian dan mayoritas penduduknya pun bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 mencapai 1.305.925 jiwa. Sumberdaya manusia berdasarkan mata pencaharian yang mendominasi adalah sektor pertanian yaitu sebesar 55,84 persen.⁵

Di Kabupaten Lamongan tidak hanya tanaman padi yang menjadi tanaman unggulan di sektor pertanian namun juga terdapat tanaman-tanaman lain yang juga menjadi tanaman pangan unggulan bagi masyarakat Lamongan. Karena petani tidak hanya menanam satu tanaman saja yaitu padi, tanaman pangan lainnya yang merupakan

³ Arum Sriwidi Astutik, "Perkembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Lamongan pada Masa Pemerintahan Bupati H. Masfuk", *AVATARA e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 5, No 1, Tahun 2017, 1560.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

⁵ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, (2011-2031)

produk unggulan di Lamongan seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar juga merupakan tanaman pangan yang menjadi produk unggulan bagi petani di Lamongan.

Menurut karakteristiknya, bagian Tengah Selatan Kabupaten Lamongan merupakan dataran rendah yang relatif agak subur yang membentang dari kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Sekaran, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo, dan Kembahngbahu, sehingga hampir sebagian besar penduduk Lamongan bermata pencarian sebagai petani.⁶ Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan terdiri dari 32 kecamatan dengan luas lahan sawah sebesar 87.650 hektar (ha) dengan frekuensi ditanami padi sebesar 85.122 hektar (ha) dan sebesar 2528 hektar (ha) yang tidak ditanami.⁷

Luas lahan pertanian di kecamatan Sekaran sebesar 3.119,08 Ha (62,84 %) dari luas Wilayah Kecamatan Sekaran yaitu 4.963,02 Ha. Luas lahan pertanian menurut jenis irigasi, lahan pertanian dengan irigasi sederhana merupakan lahan terluas di Kecamatan Sekaran yaitu seluas 3.040,40 Ha (97,47 %) dari total lahan pertanian, lahan tadah hujan seluas 78,68 Ha (2,52%) dari total lahan pertanian. Jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, maka produksi padi meningkat hampir 50%. Pada Tahun 2005 produksi padi 32,7 ribu ton menjadi 49 ribu ton pada Tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 16 ribu ton. Produksi padi menyebar ke seluruh Desa di Kecamatan Sekaran, Desa penghasil padi terbesar yaitu Desa Sungegeneng sebesar 7,7 ribu ton, dan Desa penghasil padi paling kecil di Kecamatan Sekaran adalah Desa Titik sebesar 446 ton, sedangkan

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamongan diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 19.13

⁷ Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, *Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamongan*, tahun 2015.

Desa Kendal menduduki peringkat ke-11 dari 21 Desa di Kecamatan Sekaran dengan menghasilkan padi sebesar 1,4 ribu ton.⁸

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di daerah perdesaan adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani Jawa Timur pada bulan Juni 2017 naik 0,82 persen dibandingkan dengan bulan Mei 2017 dari 102,16 menjadi 103,00. Jika dilihat perkembangan masing-masing sub sektor pada bulan Juni 2017 terhadap bulan sebelumnya, empat sub sektor pertanian mengalami kenaikan NTP sedangkan satu sub sektor lainnya mengalami penurunan. Kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Perikanan sebesar 1,44 persen dari 107,51 menjadi 109,07, diikuti sub sektor Tanaman Pangan sebesar 1,40 persen dari 99,36 menjadi 100,75, sub sektor Peternakan sebesar 1,09 persen dari 107,73 menjadi 108,91, dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,12 persen dari 98,96 menjadi 99,08. Sedangkan penurunan NTP terjadi pada sub sektor Hortikultura sebesar 0,15 persen dari 100,80 menjadi 100,66.⁹

Indonesia memiliki harapan yang sangat besar terhadap pertanian Indonesia, diharapkan pertanian Indonesia mampu menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat yang cukup bagi populasi yang meningkat, sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada impor dan dapat mencapai swasembada beras yang diharapkan. Dari sekian banyak program dari pemerintah yang sampai sekarang sedang berjalan, bukan perkara mudah untuk mencapai swasembada pangan yang akan kita tuju.

Berbagai kebijakan untuk meningkatkan produksi padi, seperti pembangunan irigasi, subsidi benih, pupuk dan pestisida, kredit usahatani bersubsidi, dan kelembagaan usahatani telah ditempuh. Demikian juga dalam pemasaran hasil, pemerintah mengeluarkan kebijakan harga dasar gabah (HDG) atau harga dasar pembelian

⁸ Ibid

⁹ Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No.41/07/35/Thn.XV. 3 Juli 2017

pemerintah (HDPP) , untuk melindungi petani dari jumlah harga dibawah biaya produksi. Sementara itu, kebijakan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat, dan agar harga beras terjangkau oleh sebagian besar konsumen. Campur tangan yang sangat besar dan sangat protektif telah membuahkan hasil, yaitu tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Namun demikian, swasembada yang dicapai hanya sesaat. Secara umum, selama lebih dari tiga dekade produksi beras dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, Indonesia hampir selalu defisit, sehingga masih tergantung pada impor.¹⁰

Kondisi defisit beras diperburuk oleh konversi lahan subur (sawah irigasi dan tadah hujan) yang terus berlangsung di Jawa, sehingga pertumbuhan produksi padi cenderung menurun. Data statistik menunjukkan bahwa 95 persen dari produksi padi nasional berasal dari lahan sawah. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor industri dan perumahan menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan dan areal pabrik. Irawan (2003) melaporkan bahwa selama 1978-1998 sekitar 1,07 juta ha lahan (30,8%) telah terkonversi menjadi lahan nonpertanian. Selama periode yang sama, terdapat pembukaan sawah baru sekitar 0,91 juta ha. Namun, sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan, pembukaan sawah baru hampir tidak mungkin. Karena keterbatasan dana pembangunan. Dengan demikian, sangat sulit mempertahankan luas areal tanam padi di Jawa. Di lain pihak, sekitar 48 persen padi ditanam di Jawa, mempunyai kontribusi produksi sekitar 58 persen dari produksi padi nasional. Ini berarti bahwa konversi lahan di Jawa akan berpengaruh buruk terhadap produksi beras nasional dan dengan sendirinya memperlemah ketahanan pangan.¹¹

Keberhasilan bangsa Indonesia berswasembada beras di tahun 1984 akan menjadi legenda saja bila dimasa mendatang kecukupan dan ketersediaan beras dan pangan

¹⁰ Dewa K.s Swastika, “Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi Padi Melalui Efisiensi Pemanfaatan Lahan Sawah di Indonesia”, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 5 No 1 Maret 2007, 37.

¹¹ Ibid

secara umum tidak dapat dipertahankan. Guna mewujudkan kembali swasembada pangan khususnya beras, secara bertahap mengurangi impor dan meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produktivitas tanaman padi dengan menggunakan sarana produksi benih yang bermutu, pestisida serta pupuk yang baik agar swasembada yang diharapkan dapat tercapai.¹²

Salah satu program pemerintah yang saat ini sedang berjalan untuk membantu petani dalam hal permodalan dan pengadaan alat pertanian yaitu Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI). Tujuan dan sasaran PMI antara lain meningkatkan produksi dan produktivitas pangan (padi) yang ditandai dengan pemberian dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang harus dikelola secara baik oleh kelompok berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Intensifikasi pertanian adalah pengelolaan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana.

Pentingnya intensifikasi pada padi ini dikarenakan sistem pengelolaan budidaya tanaman padi saat ini sering mengalami kesulitan pada penyediaan sarana produksi berupa pupuk. Masalah penyediaan pupuk dikarenakan oleh keterbatasan modal usaha tani dan juga diakibatkan oleh seringnya terjadi kelangkaan pupuk yang berdampak pada harga pupuk menjadi tidak stabil. Hal ini mengakibatkan petani dalam usaha taninya hanya melakukan pemupukan seadanya saja tanpa memperhatikan seberapa banyak jumlah pupuk/dosis pupuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman padi sehingga produksi padi menurun.

Program PMI dari pemerintah ini tidak hanya pada peminjaman modal saja, melainkan juga penyuluhan seputar teknologi dan inovasi di bidang pertanian. Melalui program PMI ini pemerintah memberikan pinjaman modal kepada kelompok tani dalam

¹² Aminuddin, "Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) dalam Usahatani Padi di Desa Tanjungseteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Oganhilir", *Jurnal KPM* Vol 2 No 1 April 2005, 26.

bentuk pupuk, obat pertanian, serta penyuluhan dengan menggunakan akad pinjaman atau dalam istilah islam disebut dengan akad *qardh*. Kemudian kelompok tani tersebut wajib mengembalikannya pada saat panen tiba.

Qardh atau (hutang piutang) adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Islam mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur tentang urusan hutang piutang. Konsep hutang piutang (muamalah) dalam Islam pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam. Namun seiring berkembangnya zaman, konsep muamalah telah bercampur dengan dengan konsep dari luar Islam. Perkara hutang piutang penting untuk diketahui oleh umat Islam agar selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan UU No.19 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 4 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijelaskan bahwa “Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, holikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem”.¹³ permodalan berpengaruh pada keberhasilan upaya peningkatan hasil pertanian. Saat ini perbankan akan memilah-milah untuk memberikan modal kepada petani. Perbankan ketika akan memberikan pembiayaan atau modal pinjaman kepada petani akan melihat kelayakan usaha tani, dengan kata lain, perbankan hanya memberikan modal pinjaman kepada pengusaha tani yang sudah mapan, sedangkan petani tradisional sulit untuk mendapatkan pinjaman modal dari perbankan.

Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai

¹³ UUD RI, *Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, Permendagri RI Nomor 19 Tahun 2013.

dengan jumlah yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta.¹⁴

Dari permasalahan tersebut, penulis mengambil penelitian dengan judul “**Analisis Pinjaman pada Program PMI (Peningkatan Mutu Intensifikasi) dalam Memberdayakan Masyarakat Petani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kelompok Tani Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah bagaimana Analisis Pinjaman pada Program PMI (Peningkatan Mutu Intensifikasi) dalam Memberdayakan Masyarakat Petani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui model pemberdayaan petani melalui program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) dengan menggunakan akad *Qardh* pada Kelompok Tani Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kelompok Tani Desa Kendal.

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang diperoleh Kelompok Tani Desa Kendal melalui program pemerintah yaitu Peningkatan Mutu Intensifikasi dalam kaitannya menggali potensi dan memeperdayakan petani Desa Kendal. Selanjutnya dengan adanya penelitian ini akan terjalin interaksi antara pengelola dan peneliti, sehingga dapat saling bertukar fikiran untuk kemajuan kedepannya. Kemudian seiring dilakukannya penelitian ini dapat memacu semangat para anggota Kelompok

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Kencana, 2011), 212

Tani untuk lebih mengembangkan usaha pertaniannya dan bisa menjadi contoh untuk Kelompok Tani desa lainnya.

2. Bagi Akademisi

Dapat menjadi referensi dan sarana penilaian dalam menunjang penelitian selanjutnya dan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai media perantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai harapan-harapan mereka terhadap program pemerintah.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, tidak ada penelitian yang sama di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, namun ada beberapa penelitian yang mirip dengan judul peneliti, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Asih Murniyati Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2002 dengan judul “*Analisis Hubungan Faktor-faktor Intern Petani dengan Tingkat Motivasinya dalam Pemanfaatan Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi di Kabupaten Magelang*”. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang faktor-faktor intern yang mendorong tumbuhnya motivasi dalam pemanfaatan Proyek PMI Padi serta menganalisis hubungan faktor-faktor intern petani dengan tingkat motivasinya dalam memanfaatkan Proyek PMI Padi.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Urutan Sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan

¹⁵ Asih Murniyati, *Analisis Hubungan Faktor-faktor Intern Petani dengan Tingkat Motivasinya dalam Pemanfaatan Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi di Kabupaten Magelang*, (Surakarta: Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2002).

Mutu Intensifikasi (PMI) dengan Menggunakan Akad *Qardh*” ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang pada garis besarnya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai konsep dasar akad *qardh*, yang meliputi definisi, landasan syariah, hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, hikmah *qardh* serta aplikasi *qardh* dalam perbankan syariah. Dan yang kedua menjelaskan pengertian pemberdayaan masyarakat petani. Dan yang terakhir menjelaskan tentang karakteristik program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) dari pemerintah.

Bab III: Metode Penelitian

Berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, obyek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang temuan lapangan terkait dengan gambaran umum objek penelitian meliputi keadaan kelompok Tani Desa Kendal, dan mekanisme pemberian modal dalam bentuk pupuk kepada petani dengan menggunakan akad *qardh* serta analisis model pemberdayaan petani melalui program PMI.

Bab V

Penutup

Memuat tentang kesimpulan dan Daftar Pustaka.